EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia

Dwinta Fitrianty[1*] dan Nur Indah Lestari [2]
[1]Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal; Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
[2]Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl. Bintaro Utama Sektor V Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
*e-mail : dwinta.fitrianty@gmail.com

Artikel Info

Received :
8 March 2024
Revised :
31 March 2024
Accepted :
4 April 2024

Kata Kunci :
Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Data Panel

Keywords :
Economic Growth, Government Spending, Panel Data

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan. Tren pertumbuhan ekonomi nasional periode 2014-2018 meningkat 0,16%, tetapi tren tersebut apabila dibedah ke level provinsi menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Disisi lain, belanja pemerintah daerah, sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi regional, seluruh provinsi dan kabupaten/kota secara agregat mengalami peningkatan. Fenomena yang terjadi adalah banyak daerah yang mengalami tren belanja yang meningkat, sedangkan tren pertumbuhan ekonominya menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelanjaan pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan data 37 provinsi dan 429 kabupaten/kita selama 2007-2017 dan menerapkan metode Panel EGLS, regresi data menunjukkan hasil yang beragam. Belanja modal, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara komponen belanja yang lainnya tidak signifikan. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah tidak efektif dan menyebabkan *crowding-out* terhadap konsumsi swasta sehingga berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi regional.

The Effect of Local Government Spending based on Economic Classification on Regional Economic Growth in Indonesia

ABSTRACT

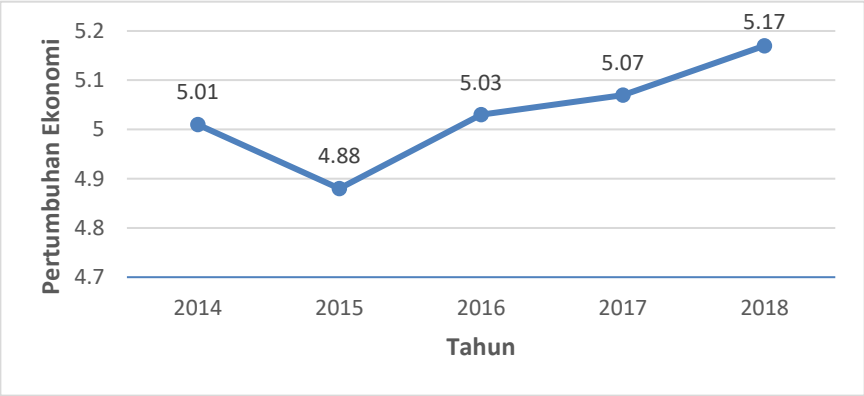
Economic growth is a primary development goal. While national economic growth trended upwards 0,16% from 2014 to 2018, a different trend emerged at the provincial level. In the other side, regional government spending, that bolster local economic growth, across all provinces and districts/cities has increased. Hence, despite rising spending in many regions, economic growth trends downward. This study seeks to analyze whether local government spending, classified by economic category, influences regional economic growth. Using data of 37 provinces and applying Panel

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

ECGLS, regression data presents mixed findings. Capital expenditure, interest expenditure, social transfer expenditure, and unexpected expenditure show statistically negative and significant effects on economic growth, while other expenditure components do not. This suggests that local government spending is ineffective and crowds out private consumption, leading to a decline in regional economic growth.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting dan yang paling mudah digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan suatu negara (Todaro & Smith, 2014). Selama tahun 2014 s.d. 2018, tren laju pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat dari 5,01% di tahun 2014, menjadi 5,17% di 2018, seperti ditunjukan pada Gambar 1.



Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

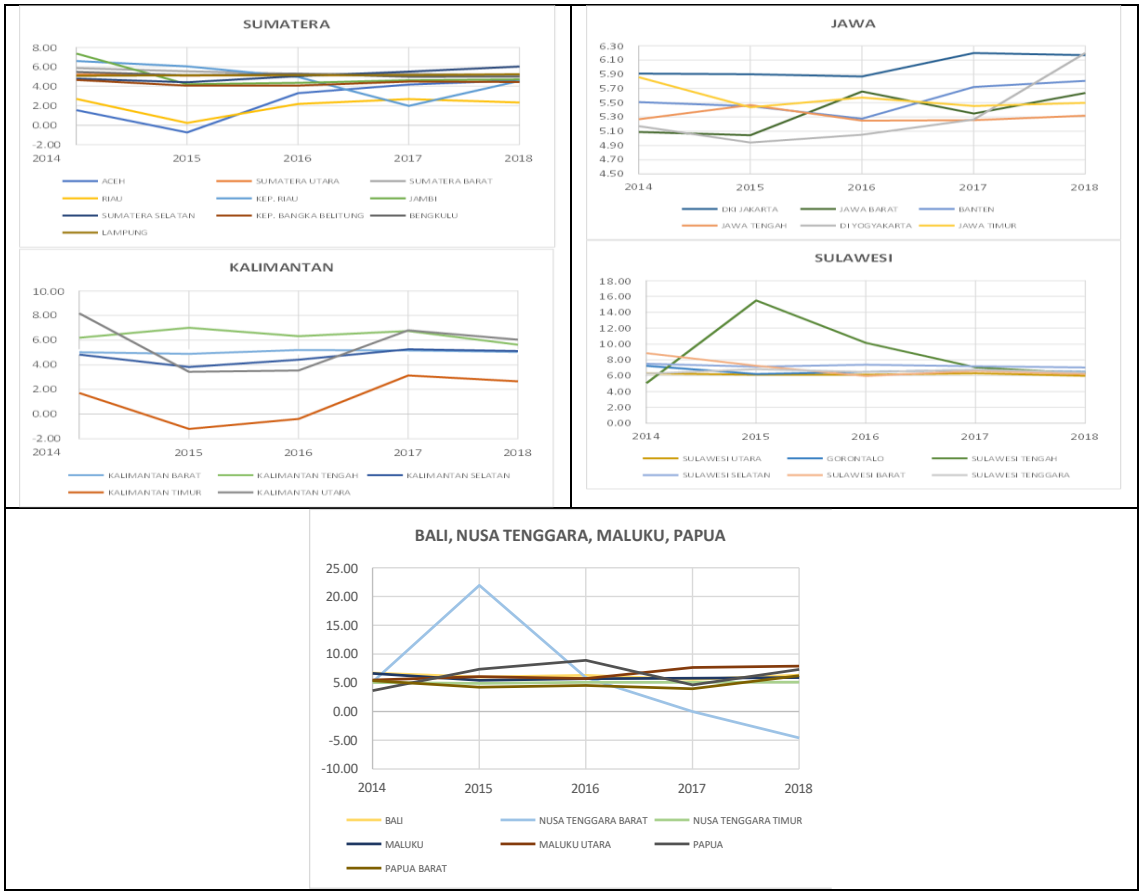
Gambar 1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jika dilihat lebih rinci, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional merupakan rerata dari tren laju pertumbuhan ekonomi regional yang beragam. Banten dan Jawa Timur mengalami tren pertumbuhan yang sama dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional, tapi beberapa provinsi mengalami tren pertumbuhannya menurun, seperti Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau. Variasi pertumbuhan ekonomi regional ditunjukkan pada Gambar 2.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, dalam berita media daring (*online*) Sindonews (17 Juli 2018), menyatakan bahwa fenomena pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang tidak merata merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Upaya pemerataan pembangunan seharusnya dapat diatasi oleh kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya melalui kebijakan belanja daerah yang efektif dan efisien.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan yang semakin besar dalam menentukan kebijakan belanja daerah. Daerah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan belanjanya ke dalam pos-pos belanja yang dianggap prioritas sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Melalui kewenangan otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sudah seharusnya pemerintah membelanjakan anggaran dengan efektif dan efisien untuk pembangunan daerahnya.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

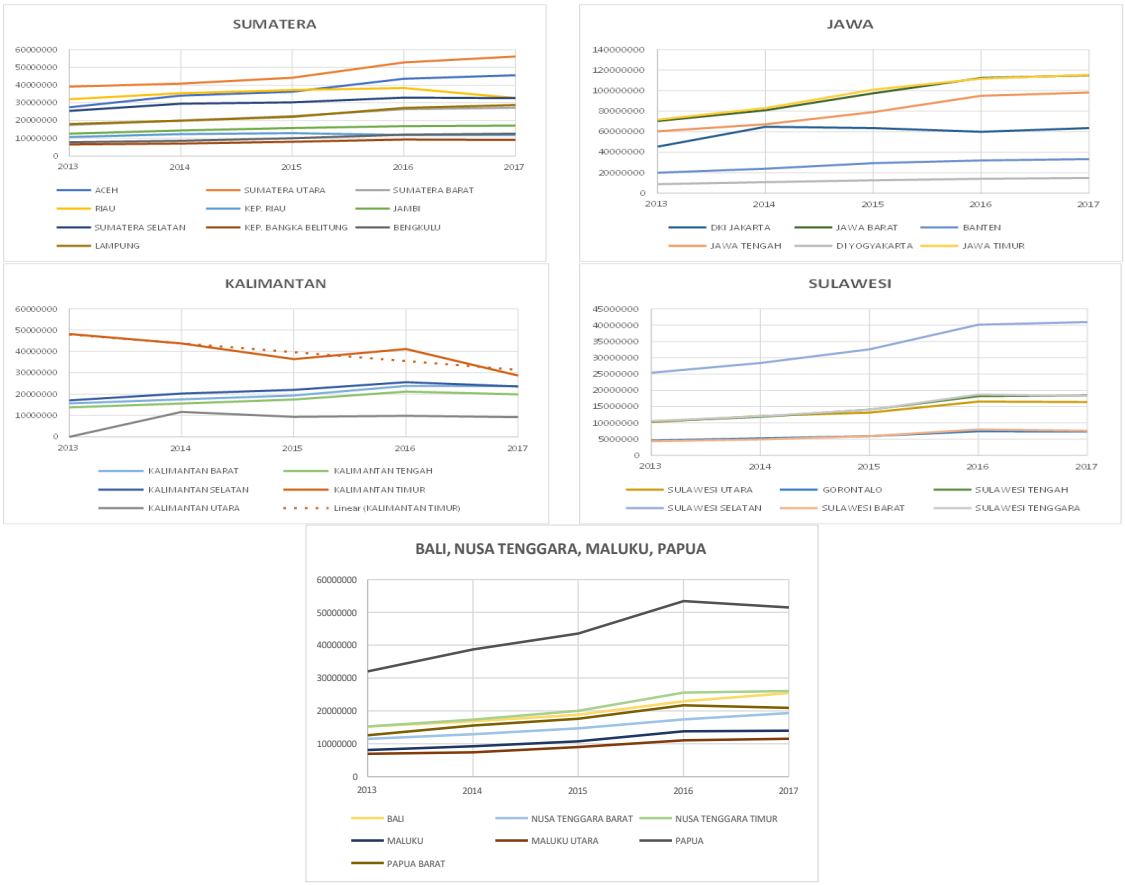


Sumber : Diolah dari BPS, 2020.

Gambar 2 Tren Pertumbuhan Ekonomi Regional

Berdasarkan belanja pemerintah daerah selama 2014-2018 (Gambar. 3), sebanyak 33 dari 34 provinsi mengalami tren peningkatan realisasi belanja selama periode tersebut, sedangkan provinsi Kalimantan Timur mengalami tren penurunan belanja sejak tahun 2013 karena adanya pembentukan provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan belanja daerah secara umum akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi regional (Sukirno, 2014). Namun, pada beberapa provinsi, kondisi ideal tersebut tidak terwujud. Berdasarkan informasi pada gambar 3, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan realisasi belanja, tetapi pada beberapa provinsi, kondisi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produk domestik regional bruto seperti ditunjukkan pada gambar 2. Provinsi-provinsi yang mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Sementara itu, empat belas provinsi lainnya mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836



Sumber : Diolah dari BPS, 2020.

Gambar 3 Tren Belanja Pemerintah Daerah

Penelitian di level internasional mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Kebanyakan penelitian internasional memodelkan belanja pemerintah sebagai salah satu input fungsi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (fungsi produksi) serta mengklasifikan belanja pemerintah menjadi *current expenditure* dan *capital expenditure*. Salah satu penelitian menyatakan bahwa *capital expenditure* pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan *current expenditure* dapat menyebabkan *crowding-out effect* dan berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Gupta, Clements, Baldacci, dan Mulas-Granados, 2005). Hasil penelitian yang berbeda menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara agregat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika dirinci, *capital expenditure* berpengaruh negatif dan *current expenditure* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Gregoriou dan Ghosh, 2008). Secara terpisah, beberapa riset membuktikan bahwa *current expenditure* secara statistik signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Laboure dan Taugourdeau, 2018; Gregoriou dan Ghosh, 2008; dan Gupta et al., 2005). Di sisi lain, *current expenditure* tidak menunjukkan signifikansi secara statistik dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bayraktar dan Dodson, 2018; Dandan, 2011; dan Bose et al., 2007).

Hasil yang beragam juga ditemukan pada pengaruh *capital expenditure* terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa riset membuktikan bahwa *capital expenditure* secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Laboure dan Taugourdeau,

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

2018; Gregoriou dan Ghosh, 2008; Bose et al., 2007; dan Gupta et al. (2005). Namun, terdapat pula penelitian yang membuktikan bahwa *capital expenditure* tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Okafur, Onwumere, dan Ibe, 2012).

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan, tetapi riset yang melihat pengaruh masing-masing komponen belanja berdasarkan jenis belanja terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang masih sedikit. Kebanyakan penelitian dalam negeri menguji hubungan belanja modal, belanja berdasarkan fungsi, dan kelompok belanja (belanja langsung dan tidak langsung) dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Deswantoro dkk meneliti pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat (Deswantoro, Ismail, dan Hendarmin, 2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, sedangkan belanja barang/jasa dan hibah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian lebih lanjut yang membahas pengaruh masing-masing jenis belanja pemerintah, dalam hal ini belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tak terduga terhadap pertumbuhan ekonomi regional menjadi menarik untuk dilakukan baik secara terpisah maupun keseluruhan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan terkait pengelolaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat menajukan perekonomian regional sekaligus nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder keluaran resmi dari BPS dan DJPK selama periode 2007 sampai 2017 di 33 provinsi dan 429 kabupaten/kota. Meskipun sejak 2007 sampai 2018 ada 75 daerah otonom baru, 74 kabupaten/kota dan 1 provinsi, namun untuk menjaga kesinambungan data yang digunakan, data dob tersebut digabung dengan kabupaten/kota atau provinsi sebelumnya. Variabel terikat yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi regional provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara, variabel bebas utama yang digunakan adalah belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tak terduga; serta variabel kontrol adalah laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah dan pendapatan domestik regional bruto per kapita. Variabel-variabel tersebut dirangkai menjadi model penelitian (Laboure & Taugourdeau, 2018) berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 PKPT_{it} + \beta_2 BPEG_{it} + \beta_3 BBJS_{it} + \beta_4 BBUN_{it} + \beta_5 BSUB_{it} + \beta_6 BHIB_{it} + \beta_7 BSOS_{it} + \beta_8 BMOD_{it} + \beta_9 BTTR_{it} + \beta_{10} RLS_{it} + \beta_1 PERPOP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Rata-rata bergerak 5 tahunan pertumbuhan PDB riil perkapita setiap daerah
$PKPT_{it}$ = PDB perkapita riil pada awal setiap periode 5 tahun
$BPEG_{it}$ = Belanja pegawai pemerintah daerah i periode t
$BBJS_{it}$ = Belanja barang/jasa pemerintah daerah i periode t
$BBUN_{it}$ = Belanja bunga pemerintah daerah i periode t
$BSUB_{it}$ = Belanja subsidi pemerintah daerah i periode t
$BHIB_{it}$ = Belanja hibah pemerintah daerah i periode t
$BSOS_{it}$ = Belanja subsidi pemerintah daerah i periode t

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

$BMOD_{it}$ = Belanja modal pemerintah daerah i periode t
$BTTR_{it}$ = Belanja tidak terduga pemerintah daerah i periode t
RLS_{it} = Rata-rata lama sekolah daerah i periode t
$PERPOP_{it}$ = Pertumbuhan populasi daerah i periode t
ε_{it} = *error term*
α = konstanta
β = koefisien

Model ini diuji menggunakan analisis data panel yang terdiri dari c*ommon effect model* (CEM)*, fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) (Nachrowi dan Usman, 2006). Untuk memperoleh model terbaik, penelitian ini melakukan uji Chow, uji Laggrange Multiplier dan uji Hausman. Penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, untuk memperoleh model regresi linear terbaik *best linear unbiased estimator* (BLUE) (Gujarati, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

1. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Variabel dependen pada penelitian ini dihitung dengan metode rata-rata bergerak lima tahunan dari pertumbuhan PDRB riil per kapita. Sementara itu, variabel independen menggunakan variabel *lag* belanja pemerintah, yaitu angka komposisi masing-masing belanja daerah pada awal periode rata-rata bergerak lima tahunan dari pertumbuhan PDRB riil per kapita. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pengaruh fluktuasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek akibat perubahan siklus bisnis. Selain itu, pengeluaran publik sering membutuhkan waktu sebelum dapat berdampak pada pertumbuhan *output* perekonomian. Observasi berjumlah 3.234 yang meliputi tujuh periode penelitian dan 462 daerah.

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1, rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka panjang seluruh daerah adalah sebesar 4,07%. Nilai tertinggi pertumbuhan ekonomi sebesar 12,58% dicapai oleh kabupaten Kutai Barat dan Pertumbuhan ekonomi terendah sebesar -6,84% dialami oleh kabupaten Bontang.

Tabel 1. Statistik deskriptif variabel penelitian

	Rata-Rata	Maks.	Min.
Y	4,07%	12,58%	-7,85%
PKPT	27.157940	375.832600	2.495232
BPEG	48,30%	81,34%	5,66%
BBJS	19,00%	54,22%	6,80%
BBUN	0,51%	6,78%	0%
BSUB	0,14%	14,58%	0%
BHIB	2,64%	56,06%	0%
BSOS	3,28%	54,25%	0%
BMOD	26,24%	75,68%	3,98%
BTTR	0,29%	14,63%	0%
RLS	7.529789	12.070000	1.540000
PERPOP	1,67%	10,04%	-6,57%
Obs.		3.234	

Sumber : Diolah dari Aplikasi Eviews 9, 2023.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

2. Belanja Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah rata-rata membelanjakan 48,30% anggarannya untuk belanja pegawai. Persentase komposisi belanja pegawai tertinggi sebesar 81,34% Sementara itu, komposisi belanja pegawai terendah adalah sebesar 5,6%. Selama tahun 2007-2012, rata-rata komposisi belanja pegawai seluruh pemerintah daerah mengalami tren meningkat. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa, pemerintah daerah rata-rata menghabiskan 19% anggarannya untuk belanja barang dan jasa. Nilai tertinggi komposisi belanja barang dan jasa tercatat pada Provinsi Aceh di tahun 2012 yaitu sebesar 54,22%, sedangkan komposisi terkecil tercatat pada Kabupaten Bireun di tahun 2010.

Tidak semua pemerintah menganggarkan belanja bunga dan belanja subsidi pada APBD-nya. Rata- rata porsi belanja bunga dan belanja subsidi seluruh pemerintah daerah dalam kurun waktu 2007-2012 berturut-turut adalah sebesar 0,05% dan 0,1%. Untuk belanja hibah, rata-rata porsi belanja hibah dalam kurun waktu 2007-2012 hanya sebesar 2,64% dan belanja bansos sebesar 3,28%. Belanja tidak terduga memiliki rasio rata-rata sebesar 0,2% untuk seluruh daerah.

Rata-rata rasio belanja modal agregat provinsi, kabupaten dan kota sebesar 26,25%. Daerah yang memiliki rasio belanja modal terendah adalah kabupaten Klaten dengan angka sebesar 3,98%, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada kota Solok, yaitu sebesar 75,68%. Tren rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2007, rata-rata porsi belanja modal sebesar 34,93%, sedangkan di tahun 2012 menjadi hanya 22,56%.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Hasil Penelitian

Pengujian model regresi berganda dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa model penelitian layak digunakan untuk menaksir nilai aktual. Secara statistik, ketepatan fungsi regresi setidaknya dapat diukur dari nilai statistik F, nilai statistik t, dan nilai koefisien determinasi. Pada penelitian ini, nilai probabilitas statistik F hitung (prob > F) sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 0,05. Dengan demikian, variabel independen dan kontrol dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan PDRB riil per kapita. Hal ini juga menjadi dasar untuk meneruskan ke pengujian selanjutnya, yaitu uji parameter individual (uji statistik t).

Pada penelitian ini, nilai probabilitas statistik t hitung untuk variabel independen LOG(PKPT), BBUN, BSOS, BMOD, BTTR lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alpha 0,05, sedangkan variabel BPEG, BBJS, BSUB, dan BHIB lebih besar dari alpha. Dengan demikian, dari seluruh variabel independen, hanya variabel BBUN, BSOS, BMOD, BTTR yang secara individual atau parsial merupakan penjelas secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk variabel kontrol, ketiga-tiganya memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel kontrol merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi dari model yang diteliti adalah sebesar 88,95%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dan kontrol dalam model mampu menjelaskan 88,95% variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 11,05% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

Model regresi untuk pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional dapat ditulis sebagai berikut:

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

$$
\begin{aligned}
Yit = {} & 0{,}059 - 0{,}008*LOG(PKPT) - 0{,}018*BPEG - 0{,}005*BBJS - \\
& \text{p-value } (0{,}000) \quad (0{,}087) \quad (0{,}602) \\
& 0{,}048*BBUN - 0{,}016*BSUB - 0{,}012*BHIB - 0{,}046*BSOS - \\
& (0{,}014) \quad (0{,}312) \quad (0{,}266) \quad (0{,}001) \\
& 0{,}026*BMOD - 0{,}032*BTTR + 0{,}003*ASY - 0{,}046*PERPOP \\
& (0{,}015) \quad (0{,}014) \quad (0{,}000) \quad (0{,}000)
\end{aligned}
$$

Berdasarkan hasil regresi berganda, konstanta sebesar 0,059 berarti bahwa jika semua variabel penjelas, yang terdiri dari variabel belanja daerah dan variabel kontrol bernilai 0, maka persentase pertumbuhan ekonomi akan sebesar 0,059%. Koefisien regresi variabel PKPT sebesar -0,008 memiliki arti bahwa apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel PKPT mengalami pergerakan kenaikan satu persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan/penurunan rata-rata sebesar 0,00008%.

Selanjutnya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel BPEG mengalami kenaikan 1%, maka pertumbuhan ekonomi (Y) akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,018%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara BPEG dengan Y. Semakin meningkat komposisi BPEG maka semakin turun pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel BBJS sebesar -0,005 berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan BBJS mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,005%. Untuk variabel BBUN, koefisien bernilai negatif berarti terjadi hubungan negatif antara BBUN dengan Y, semakin naik BBUN maka semakin menurunkan nilai Y sebesar rata-rata 0,048% dan dapat pula sebaliknya, pengurangan komposisi belanja bunga sebesar 1% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional sebanyak rata-rata 0,048%.

Variabel BSUB memiliki koefisien -0,016 yang bermakna hubungan negatif dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi regional. Jika variabel penjelas lainnya diasumsikan tidak berubah, maka setiap kenaikan komposisi BSUB sebesar 1% akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 0,016% dan sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada variabel belanja hibah. Dengan koefisien regresi sebesar -0,012, setiap kenaikan BHIB sebesar 1% akan menyebabkan perrtumbuhan ekonomi menurun sebesar rata-rata 0,012% dengan asumsi variabel independen lain tetap.

Pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi pula pada variabel independen BSOS dengan koefisien regresi sebesar -0,046, variabel BMOD dengan koefisien sebesar -0,026, dan BTTR dengan koefisien regresi - 0,032. Dengan asumsi semua variabel bebas dalam kondisi ceteris paribus, pengaruh negatif dari masing-masing variabel tersebut berarti bahwa kenaikan komposisi belanja sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara berurutan sebesar rata-rata 0,046%, 0,026%, dan 0,032%

Variabel kontrol rata-rata lama sekolah atau RLS menunjukkan koefisien yang berbeda dengan variabel independen lainnya. RLS sebagai proksi *human capital* menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0,003. Hal ini berarti bahwa, dengan asumsi variabel independen lain tetap, setiap peningkatan waktu rata-rata lama sekolah akan meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan variabel kontrol RLS, pertumbuhan populasi (PERPOP) menunjukkan koefisien yang sebaliknya, yaitu negatif sebesar -0,046. Tanda tersebut bermakna bahwa populasi yang terus meningkat akan berdampak pada perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,046%.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

Pembahasan

1. **Pengaruh Belanja Pegawai Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pertumbuhan *output* perekonomian suatu negara/wilayah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan data PDB/PDRB sebagai ukuran pendapatan tiap-tiap orang dalam suatu wilayah. Pertumbuhan output yang digambarkan melalui pertumbuhan PDB/PDRB salah satunya dipicu oleh peningkatan produktivitas pada wilayah tersebut. Peningkatan produktivitas tersebut berasal dari penambahan investasi modal fisik (*physical capital investment)* dan melalui peningkatan investasi modal manusia (*human capital investment*) (Schiller, 2008). Sesuai dengan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, ketika kuantitas dan kualitas modal meningkat (*capital deepening*) maka output yang dihasilkan per tenaga kerja akan meningkat, dengan kata lain produktivitas meningkat.

Untuk *physical capital investment* terkait infrastuktur, peningkatan produktivitas terjadi melalui penambahan kuantitas dan kualitas *physical capital*. Hal tersebut dapat dicontohkan misal, produktivitas sektor perekonomian meningkat dengan penambahan infrastruktur konektivitas. Infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya-biaya tertentu (*cost reduction*). Produktivitas dapat juga berarti efisiensi dalam proses produksi (Mankiw, 2015). Output perekonomian dihasilkan dari modal fisik, modal manusia, dan tenaga kerja sehingga modal fisik bukan pendorong utama suatu pertumbuhan ekonomi. Ketika *human capital investment* meningkat maka kualitas tenaga kerja juga akan meningkat dan produktivitas dapat terdorong. Hal tersebut dapat dicapai melalui *policy tools* seperti pembangunan, pengoperasian dan subsidi sekolah serta pembangunan infrastruktur (Schiller, 2008).

Keterlibatan pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian melalui modal fisik maupun modal manusia tentu dijalankan melalui kebijakan fiskal terkait belanja. Kebijakan fiskal belanja harus dievaluasi dampaknya tidak hanya terhadap *aggregate demand* yang bersifat jangka pendek, tetapi juga pada *aggregate supply* yang bersifat jangka panjang (Mankiw, 2015). Jika kebijakan fiskal belanja mampu memengaruhi *aggregate demand* maupun *aggregate supply*, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut terpengaruh. Hal ini dikarenakan peran pemerintah, melalui belanjanya, dapat memengaruhi fungsi produksi dalam suatu perekonomian. Pemerintah berperan menjadikan belanja atau pengeluarannya sebagai pemicu pertumbuhan jangka panjang serta jangka pendek. Secara teoretis, jika pertumbuhan dilihat dari output atau produksi suatu wilayah maka output tersebut dapat diasumsikan berasal dari pemerintah dan nonpemerintah. Dari sisi pemerintah, selain menciptakan output sendiri, pemerintah juga menciptakan eksternalitas yang akan memengaruhi sektor nonpemerintah dalam menghasilkan output. Dengan kata lain, total output dari suatu wilayah tersebut akan berbeda jika pemerintah tidak ikut campur tangan.

Hasil pengujian pengaruh belanja pemerintah daerah secara simultan menunjukkan pengaruh signifikan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Gupta et al., 2005). Namun, belanja pemerintah tersebut akan memberi pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dan negatif dari belanja pemerintah dapat dilihat lebih jelas jika belanja pemerintah diuji secara *disaggregate* karena tidak semua belanja yang dilakukan pemerintah bersifat produktif, yaitu yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi (Laboure & Tougourdeau, 2018). Bahkan, belanja pemerintah yang dianggap produktif dapat menjadi tidak produktif jika komposisinya melebihi batas tertentu.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 24, No.1 Juli 2024
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i. 18836

2. **Pengaruh Belanja Pegawai Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Dalam penelitian ini, belanja pegawai memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa belanja personel menurunkan pertumbuhan ekonomi (Laboure & Taugourdeau, 2018), serta *current expenditure* (termasuk di dalamnya belanja pegawai) tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bose, et.al., 2007).

Kompensasi pegawai hanya bertujuan untuk memelihara fungsi sosial masyarakat. Namun, di atas ambang batas tertentu, peningkatan pengeluaran untuk kompensasi pegawai akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (kurva armey) (Laboure & Taugourdeau, 2018). Oleh karena itu, pengeluaran operasional pemerintah berupa pembayaran gaji tidak akan memengaruhi fungsi produksi sehingga secara jangka panjang pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh.

3. **Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Badrudin (2012) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah diharapkan akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, belanja barang dan jasa memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Gupta et al. (2005), dan Deswantoro et al. (2017). Gupta et al. (2005) menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi pengaruh tersebut tidak terjadi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan koefisien yang sama-sama negatif. Belanja barang dan jasa yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan karena alokasi belanja barang dan jasa pada kabupaten/kota dan provinsi lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan dan minum, dan belanja operasional lainnya yang kurang produktif sehingga tidak memberikan kontribusi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Deswantoro et al., 2017).

4. **Pengaruh Belanja Bunga Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Belanja bunga adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembayaran bunga dengan persentase sesuai perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Namun, pemerintah daerah tidak memiliki fleksibilitas seperti pemerintah pusat dalam hal melakukan pinjaman sehingga tidak banyak pemerintah daerah yang melakukan pembiayaan atas belanja melalui utang. Akibatnya, tidak semua pemerintah daerah memiliki belanja bunga. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya daerah yang merealisasikan belanja bunga dalam periode penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan negatif dari belanja bunga terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kenaikan belanja bunga 1% terhadap total

pengeluaran akan memberikan dampak penurunan pertumbuhan ekonomi regional sebesar rata-rata 0,048% dengan asumsi kondisi variabel lain konstan (cateris paribus) (Laboure & Taugourdeau, 2018; dan Gupta et al., 2005). Belanja bunga dapat mendorong inefisiensi dan alokasi sumber daya yang tidak produktif (Laboure & Taugourdeau, 2018). Lebih lanjut lagi, belanja bunga hanya terikat pada ada atau tidak adanya pinjaman serta syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman saja sehingga tidak memberikan manfaat apapun. Selain itu, belanja bunga pemerintah juga menggambarkan *fiscal stress* pada anggaran yang mengakibatkan porsi belanja pemerintah untuk tujuan lain juga akan berkurang.

5. **Pengaruh Belanja Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan belanja subsidi memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Subsidi pemerintah daerah dapat diberikan kepada para pelaku produksi dalam bentuk misalnya subsidi listrik kepada para pengusaha mikro, subsidi pupuk kepada para petani, atau subsidi energi kepada para nelayan. Belanja subsidi tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan *outcome* dari dana tersebut secara langsung juga tidak diketahui oleh pemberi subsidi sebab pemberi bukanlah sebagai pelaku utama pengelola dana tersebut. Semua tergantung pada pihak penerima subsidi. Subsidi dapat memiliki efek negatif pada pertumbuhan karena teori ekonomi menunjukkan bahwa subsidi yang tidak beralasan atau tidak tepat sasaran menyebabkan inefisiensi dan alokasi sumber daya yang tidak optimal, yang pada akhirnya akan memiliki efek negatif pada PDRB per kapita (Laboure & Taugourdeau, 2018).

6. **Pengaruh Belanja Hibah Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Sama seperti belanja subsidi, belanja hibah tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), belanja hibah rawan terhadap penyimpangan dan sarat dengan kepentingan politik (Sekretariat Nasional FITRA, 2015). Belanja hibah seharusnya digunakan untuk mendukung capaian program pemerintah, tetapi fenomena yang terjadi, banyak belanja hibah yang digunakan untuk keperluan kampanye Pilkada dan kegiatan fiktif. Menteri dalam negeri, Tjahyo Kumolo dalam media *online* www.tempo.co menyatakan bahwa pengelolaan belanja hibah pemerintah daerah banyak yang tidak sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, penerima tidak jelas atau tidak memenuhi persyaratan penerima hibah, peruntukannya tidak sesuai serta pertanggungjawaban dana hibah fiktif (Wisnu, 2018). Hal tersebut di atas dapat menjadi penyebab belanja hibah tidak tepat sasaran sehingga tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

7. **Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan

belanja bantuan sosial sebesar 1% dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata sebesar 0,046%. Hal tersebut dapat terjadi ketika pemerintah daerah tidak melaksanakan belanja bantuan sosial sesuai tujuan peruntukannya yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan bencana (Febriyani, 2013). Namun, apabila belanja bantuan sosial digunakan untuk membantu membiayai pengobatan bagi masyarakat miskin di luar yang ditanggung BPJS, membantu pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu dalam membiayai keperluan sekolah dan kuliah, atau membantu masyarakat kurang mampu memperbaiki rumah sehingga menjadi layak huni, maka belanja bantuan sosial dapat berdampak pada perbaikan taraf kesehatan dan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas masyarakat (Deswantoro et al., 2017).

Namun, fenomena sosial yang terjadi di Indonesia adalah dalam pengalokasian belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, tidak dilakukan identifikasi kebutuhan secara akurat sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga dalam pengalokasiannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Skoufias & Olivieri, 2013). Selain itu, sering terjadi kasus dimana belanja bantuan sosial diberikan kepada individu atau pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial, misalnya tidak mengalami risiko sosial (Dharmakarja, 2017).

Belanja bantuan sosial yang tidak tepat sasaran hanya akan menjadi belanja yang sifatnya konsumtif, tidak produktif dan mubazir. Lebih lanjut lagi, peningkatan alokasi sumber daya untuk belanja pemerintah yang sifatnya nonproduktif akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar belanja bantuan sosial tersalurkan sesuai dengan sasaran yang direncanakan (Azka, 2018).

8. **Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Berdasarkan hasil regresi, belanja modal secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Gregoriou dan Ghosh, 2008). Kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 0,0263%. Belanja pemerintah yang dibiayai dengan peningkatan pajak atau peningkatan utang dapat menyebabkan *crowding-out* konsumsi privat. Jika tingkat kebutuhan akan suatu barang publik tertentu lebih kecil atau keberadaan barang publik tersebut sudah terlalu banyak, maka penambahan belanja atas barang publik tersebut akan bersifat kontraproduktif sehingga tidak menimbulkan efek pengali terhadap perekonomian. Manfaat dari belanja lebih kecil jika dibandingkan dengan pengurangan *aggregate demand* sektor privat.

Alasan berikutnya yang mungkin menjadi penyebab hubungan negatif tersebut adalah dana pemerintah yang dialokasikan untuk belanja modal tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran untuk menghasilkan efek yang diharapkan pada pertumbuhan ekonomi (Oleyeke dan Falade, 2016). Terlebih, belanja modal gedung dan bagunan juga berpengaruh negarif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sunarya dan Putri, 2021), dampak atas pembangunan infrastruktur akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi setelah pembangunan infrastuktur tersebut selesai (Luter et al., 2019).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara agregat (Bose et al., 2007) maupun hanya pada belanja modal jembatan, jaringan air, serta instalasi listrik dan telpon (Luter et al., 2019). Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel maupun area penelitian. Penelitian ini menggunakan banyak

daerah sebagai objek penelitian sehingga memiliki variabilitas yang tinggi terhadap karakteristik objek penelitian. Selain itu, dalam pengukuran variabel dependennya, penelitian sebelumnya (Bose et al., 2007) menggunakan dua titik observasi, yaitu rata-rata pertumbuhan PDB per kapita selama tahun 1970-1979 dan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita dalam kurun waktu 1980-1989 sehingga jumlah pengamatan lebih sedikit.

9. **Pengaruh Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional**

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan realisasi belanja tidak terduga sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 0,032%.

Belanja tak terduga dapat memberi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena mengurangi proporsi belanja produktif pemerintah. Akan tetapi, jika belanja tersebut terkait dengan bencana alam maka dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bencana alam sendiri cenderung meningkatkan aliran investasi pada suatu wilayah pasca terjadinya bencana. Aliran investasi baik asing maupun domestik serta perputaran uang yang terjadi pada daerah bencana akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan. Namun, faktanya, belanja tidak terduga tidak sepenuhnya ditujukan untuk penanggulangan bencana alam karena dari komponennya sendiri belanja
tidak terduga meliputi pengembalian belanja tahun lalu yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah sering melakukan pergeseran alokasi belanja tidak terduga untuk kegiatan lain yang anggarannya tidak mencukupi atau untuk kegiatan lain yang belum dianggarkan dalam APBD. Contohnya saja, menurut pemberitaan media online www.detik.com tanggal 4 Juni tahun 2018, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan pembayaran tunjangan hari raya (THR) PNS.

Meskipun hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua komponen belanja pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang, hal tersebut tidak semata-mata berarti bahwa belanja pemerintah daerah tidak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pengaruh negatif belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan bahwa yang terpenting adalah bukan hanya terkait komposisi belanja pemerintah daerah atau dari sisi kuantitasnya, melainkan juga dari sisi kualitas belanja tersebut, yaitu dampak nyata dari apa yang dihasilkan belanja pemerintah daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Dapat dipahami bahwa belanja pemerintah tidak hanya memiliki satu sasaran tunggal tertentu, misalnya meningkatkan pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi saja, tetapi terdapat tujuan-tujuan lainnya. Sebagai contoh, saat ini, di Indonesia, belanja modal khususnya infrastruktur layanan dasar publik merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi dalam rangka mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018). Oleh karena itu, pemerintah pusat cenderung mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur, terlepas dari permasalahan terkait apakah peningkatan komposisi belanja tertentu dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi regional.

SIMPULAN

Setelah diuji secara disagregasi berdasarkan klasifikasi ekonomi, belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh beragam terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sebagian belanja pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja hibah pemerintah daerah secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Sebagian yang lain seperti belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga pemerintah daerah secara statistik berkorelasi negatif dan signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Namun, secara simultan, semua variabel belanja ditambah variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.

Pada penelitian ini, *time-series* selama sebelas tahun (tujuh periode observasi setelah diberi perlakuan rata-rata bergerak) menjadi keterbatasan penelitian karena rata-rata penelitian terkait belanja pemerintahan menggunakan periode selama 20 tahun. Selanjutnya, saran bagi Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab pendistribusian belanja pemerintah dapat merumuskan struktur belanja modal dan mengarahkan kebijakan penggunaan dana transfer untuk belanja pemerintah yang berdampak terhadap perekonomian regional.

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Bayraktar, N., & Moreno-Dodson, B. (2018). Public expenditures and growth in a Monetary Union: The case of WAEMU. Eurasian Journal of Economics and Finance, 6(1), 107-132.

Bose, N., Haque, M., dan Osborn, D. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5): 533-556.

Dandan, M.M. (2011). Government Expenditures and Economic Growth in Jordan. *International Conference on Economic and Finance Research*, 4.

Deswantoro, D.B., Ismail, A., dan Hendarmin. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3, 187-210.

Dharmakarja, I. G. M. A. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi*, 1(2): 374-389.

Febriyani. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.

Gregoriou, A., dan Ghosh, S. (2008). On The Heterogenous Impact of Public Capital and Current Spending on Growth Across Nations. *Economics Letters*, 105: 32- 35.

Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics 4th Edition*. The McGrow-Hill Companies

Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., dan Mulas-Granados, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24: 441-463.

Laboure, M., dan Taugourdeau, E. (2018). Does Government Expenditure Matter for Economic Growth? *Global Policy*. 9. 10.1111/1758-5899.12540.

Luter, M., Indrocahnyo, I., dan Resti, I.L.V. (2019). Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 17 No. 2.

Mankiw, N. Gregory. (2015). *Macroeconomics 9th Edition*. New York: Worth Publishers.

Nachrowi, D Nachrowi & Hardius, Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Oleyeke, O., dan Falade, O.E. (2016). Government Capital Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Any Lesson From Disaggregated Analysis? *European Journal of Business and Management*, 8(31): 76-84.

Schiller, B. (2008). *The Macro Economy Today 11ed*. New York: McGraw-Hill.

Skoufias, E., dan Olivierri, S. 2013. Sources of Spatial Welfare Disparities in Indonesia: Household Endowment or Returns? *Journal of Asian Economics*: 62-79.

Sunarya, A.S., dan Putri, S.A.M. (2021). Dana Perimbangan, Belanja Infrastruktur Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 5 No. 2: 54-67.

Todaro, M., dan Smith, S. (2014). Economic Development 12th Edition. Boston: Pearson. Prepared for the Joint Economic Committee United States Congress.

Media Online

Azka, R.M. (2018). *Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan*. https://id.beritasatu.com/home/ (diakses 22 Februari 2019).

Sekretariat Nasional FITRA. (2015). *Potensi Penyelewengan Dana Hibah dan Bantuan Sosial*. https://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2016/05/potensi- penyelewengan-dana-hibah-bantuan-sosial/ (diakses 18 Mei 2019).

Wisnu. (2018). *Tjahjo Meminta Pemerintah Daerah Batasi Dana Hibah*. https://nasional.tempo.co/read/782530/tjahjo-meminta-pemerintah-daerah-batasi-dana-hibah/full&view=ok, (diakses 18 Mei 2019).